

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa dengan 2 unit Sarana Kesehatan Puskesmas eksisting yang ada dikecamatan berdasarkan penduduk sudah terpenuhi, Namun untuk berdasarkan Jangkauan Pelayanan 2 unit Sarana Kesehatan Puskesmas ini belum bisa melayani untuk satu Kecamatan Lengayang, Jadi butuh Penambahan Sarana Kesehatan Puskesmas Pembantu di Nagari Lakitan dengan melayani Nagari yang tidak terlayani Puskesmas eksisting seperti Nagari Lakitan dan Nagari Lakitan Tengah.

5.2 Saran

Untuk mengatasi ketimpangan jangkauan pelayanan kesehatan di Kecamatan Lengayang, disarankan agar pemerintah daerah menambah unit Puskesmas atau Puskesmas Pembantu di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal, seperti Nagari Lakitan, Lakitan Selatan, dan Lakitan Tengah. Penambahan fasilitas ini penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat yang selama ini berada di luar cakupan pelayanan dua Puskesmas eksisting. Prioritas penempatan bisa diarahkan pada wilayah dengan jumlah penduduk tinggi dan tingkat ketidakterlayanan besar, berdasarkan data distribusi penduduk dan kebutuhan layanan.

Selain itu, evaluasi terhadap lokasi dua Puskesmas yang ada saat ini juga perlu dilakukan. Jika memungkinkan, reposisi atau pengembangan cakupan wilayah pelayanan dari fasilitas yang sudah ada dapat meningkatkan efisiensi. Penguatan infrastruktur jalan dan transportasi menuju lokasi Puskesmas menjadi penting agar masyarakat dari daerah terpencil dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat. Penerapan sistem zonasi dan rujukan antar wilayah juga dapat membantu menyebarkan beban pelayanan secara merata antar fasilitas kesehatan.

Sebagai tambahan, optimalisasi pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) dan telemedisin akan sangat membantu dalam merencanakan penempatan fasilitas baru serta memberikan layanan di daerah sulit dijangkau. Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, agar pengembangan sarana kesehatan tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. (1994). *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Bernhardsen, T. (1992). *Geographic Information Systems: An Introduction*. New York: John Wiley & Sons.
- Bernhardsen, T. (2002). *Geographic Information Systems: An Introduction* (2nd ed.). New York: Wiley.
- Canning, D. (1998). "A Database for Sectoral Physical Capital Stock: Sources and Methods." World Bank Economic Review.
- Chapin, F. S. (1995). *Urban Land Use Planning*. Urbana: University of Illinois Press.
- Claire, R. (1979). *Urban Public Facilities: Planning and Financing*. Washington: U.S. Department of Housing and Urban Development.
- Depkes RI. (1991). *Pedoman Umum Puskesmas*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Depkes RI. (1999). *Indonesia Sehat 2010: Kebijakan Dasar dan Strategi Pembangunan Kesehatan*. Jakarta: Depkes RI.
- Effendy, N. (1998). *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Environmental System Research Institute (ESRI). *Understanding GIS: The ARC/INFO Method*. Redlands, CA: ESRI Press.
- Gebhy Bamba. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pelayanan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hatmoko, A. (2006). *Manajemen Puskesmas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Henlita. (2013). *Analisis Kebijakan Publik dalam Perencanaan Kota*. Jakarta: UI Press.
- Ihsan, F. (1998). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kodoatie, R. J. (2005). *Perencanaan Infrastruktur Wilayah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiyani, R., & Murwatiningsih. (2015). *Perencanaan Fasilitas Umum Perkotaan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Mubarak, W. I., & Chayatin, N. (2009). *Ilmu Keperawatan Komunitas 1*. Jakarta: Salemba Medika.
- Murai, S. (1999). *Sistem Informasi Geografis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pudjiantoro, W. (2008). *Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota*. Jakarta: Bappenas.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.
- Rangkuti, F. (2008). *Manajemen Kota dan Daerah*. Jakarta: Gramedia.

- Rizki Ya'qubara Arridha. (2019). *Analisis Overlay dalam Perencanaan Wilayah*. Skripsi, Universitas Andalas.
- Simmons, J. (1990). *The Urban Economy*. Oxford: Oxford University Press.
- Sujarto, D. (2001). *Perencanaan Kota dan Wilayah*. Bandung: ITB.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, R. (2012). *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*. Bandung: Penerbit ITB.
- Walter Christaller. (1933). *Central Places in Southern Germany* (Terjemahan oleh Baskin, (1966). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Wu, C.-R., Lin, C.-T., & Chen, H.-C. (2005). "Integrated Decision Making for Location Selection of a Hospital in Taiwan." *International Journal of Management Science*, 33(3), 303–311.
- Andi Arlyn Avila. (2018). *Analisis Pola Spasial Persebaran dan Aksesibilitas Area Pelayanan Prasarana Kesehatan di Kota Makassar*. Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Permenkes RI No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
- Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
- Permenkes RI No. 44 Tahun 2016 tentang Akreditasi FKTP.
- Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Surat Keputusan Menteri PAN No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.